



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAFRI BURHANUDDIN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
3. NHK : 196633

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.403.270.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/300 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.325.076.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/70 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 598.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/200 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 517.794.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di LUWU, WARISAN Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di MAMUJU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di MAMUJU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Bangunan Seluas 24.3 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 667.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 194.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, VESPA 5125 VESPA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 544.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 2.107.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 521.295.484**F. HARTA LAINNYA** Rp. 211.823.663



Sub Total	Rp.	6.981.389.147
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.981.389.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.